

Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara



Manotar Tampubolon

KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Manotar Tampubolon



GETPRESS INDONESIA

KAPITA SELEKTA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis :

Manotar Tampubolon

ISBN :978-623-198-713-6

Editor : Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatri Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit: GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara dapat diselesaikan oleh penulis. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dituntut untuk terus mengevaluasi sistem pemeritahan guna dapat melindungi setiap kepentingan warga masyarakat. Untuk itu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memeliki kewenangan untuk membentuk kebijakan seperti Peraturan Perundang-Undangan dan menetapkan kebijakan. Namun, terkadang sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengakibatkan kerugian kepada sebagian masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kepentingan warga masyarakat menjadi hal sangat penting untuk diketahui. Menjawab akan kebutuhan tersebut maka penulis menerbitkan buku yang berisi tentang Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara. Buku ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengaharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Agustus 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA.....	1
A. PERLINDUNGAN HUKUM	1
B. JENIS-JENIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA.....	6
1. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perdata	6
2. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Hukum Publik.....	9
BAB II PENEGRAKAN HUKUM, KEKUASAAN, DAN TRIAS POLITICA	12
A. PENEGRAKAN HUKUM	12
B. KEKUASAAN	15
1. Pengertian Kekuasaan.....	15
2. Hubungan Hukum dengan Kekuasaan.....	18
C. PEMBAGIAN KEKUASAAN (<i>TRIAS POLITICA</i>).....	22
1. Cabang Kekuasaan Legislatif.....	25
2. Cabang Kekuasaan Eksekutif.....	26
3. Cabang Kekuasaan Judikatif.....	27
BAB III FUNGSI HUKUM DAN OMBUDSMAN	29
A. FUNGSI HUKUM	29
B. OMBUDSMAN	31
1. Pengertian dan Kedudukan Ombudsman	31
2. Tugas dan Wewenang Ombudsman	32
3. Asas-Asas dan tujuan Ombudsman	34
BAB IV BESHICKING	37
A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA <i>(BESCHIKING)</i>	39
B. UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN (<i>BESCHIKKING</i>)	41

C. KEABSAHAN KEPUTUSAN DAN TINDAKAN PEMERINTAH.....	43
D. PARAMETER KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAH.....	45
E. LMACAM-MACAM KEPUTUSAN/KETETAPAN.....	46
1. Keputusan Positif	47
2. Keputusan Negatif.....	48
3. Keputusan Declaratoir	48
4. Keputusan Konstitutif	48
F. Tindakan-Tindakan Pemerintah Lainnya.....	48
1. Dispensasi	48
2. Izin.....	49
3. Konsesi	49
4. Perintah.....	49
BAB V KEWENANGAN, JENIS, DAN PENDELEGASIAN WEWENANG	51
A. Wewenang Pemerintahan dan Asas Legalitas	51
1. Asas Legalitas Hukum Administrasi Negara.....	51
2. Wewenang Pemerintah.....	54
B. SUMBER DAN MEKANISME PEROLEHAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN	56
BAB VI <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	61
A. SEJERAH LAHIRNYA <i>GOOD GOVERNANCE</i>	61
B. PERISTILAHAN GOOD GOVERNANCE ATAU ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	64
C. KONSEP DASAR <i>GOOD GOVERNANCE</i>	64
D. IMPLEMENTASI <i>GOOD GOVERNANCE</i>	66
E. FREIES ERMESSEN	69
F. FUNGSI DAN ARTI PENTING LASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>)	71

BAB VII PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA	78
A. KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM HUKUM PUBLIK.....	78
B. KEDUDUKAN PEMERINTAH DALAM HUKUM PRIVAT.....	80
C. PERBUATAN ATAU TINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA.....	81
BAB VIII PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA	84
A. PENGERTIAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA.....	84
B. ASAS-ASAS PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	86
C. KOMPETENS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....	89
D. SENGKETA TATA USAHA NEGARA	92
E. PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA.....	93
1. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	95
2. Pemeriksaan Persiapan.....	98
3. Pemeriksaan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara	99
4. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat	100
5. Ketidakhadiran Penggugat atau tergugat di persidangan	101
6. Perubahan atau pencabutan gugatan dan perubahnl jawaban	102
7. Intervensi.....	102
8. Pembuktian	103
9. Beban Pembuktian	106
10. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	106
11. Pelaksanaan/Eksekusi Isi Putusan	108
12. Upaya-Upaya Hukum:	109

BAB IX ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA	113
A. PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA	113
B. PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	114
C. RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	116
D. HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DENGAN HUKUM LAINNYA.....	117
1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara	117
2. Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Privet dan Hukum Pidana.....	117
BAB X PENEGAKAN NORMA HUKUM ADMINISTRASI	
NEGARA.....	118
A. KONSEP PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	118
B. SANKSI ADMINISTRASI.....	119
1. Paksaan Pemerintahan (<i>bestuursdwang</i>)	120
2. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan (izin, pembayaran, dan subsidi)	121
3. Denda Aministrasi	121
4. Uang Paksa	121
BAB XI NEGARA HUKUM DAN HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA	123
A. KONSEP NEGARA HUKUM.....	123
B. ASAS-ASAS NEGARA HUKUM	126
BAB XII ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	131
A. PENGERTIAN ADMINISTRASI.....	131
B. ADMINISTRASI NEGARA	132
C. SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	133
D. OBJEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	135

E. TINDAKAN PEMERINTAH	135
BAB XIII PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	137
A. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	137
B. MACAM-MACAM PERBUATAN HUKUM PEMERINTAH.....	138
BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	143
A. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN	143
B. PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	148
DAFTAR PUSTAKA.....	152

Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M. A., M. H.

Penulis lahir di Lumban Dolok, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penulis adalah dosen tetap pada program studi magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Master Of Arts di bidang International Studies dari University Of Wollongong, Australia, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Doktor Hukum Dari Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Postdoktoral di University of Catania Italia. Penulis sedang melanjutkan studi Philosophy of Doctor (Ph. D) di Fakulti Undang- Undang Universiti Terknologi MARA (UiTM) Malaysia. Penulis menekuni bidang penelitian, hukum dan hak asasi manusia, kebebasan beragama serta etnik minoritas.



Jln. Palarik Air Pacah
RT001/006 Kec. Koto Tangah
Kota Padang

